

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Salah satu keterlibatan masyarakat dalam proses politik di Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilu di Indonesia telah dilakukan sebanyak 12 periode yang terakhir diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Biasanya pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu yang terpisah, namun pemilu kali ini untuk pertama kalinya masyarakat memilih secara serentak Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD-RI. Sekitar 2500 lebih daerah pemilihan (Dapil) yang tersebar di Indonesia (Nurkinan, 2018) telah terpilih ratusan anggota legislatif dari belasan ribu calon legislatif yang terdaftar dan juga Presiden serta wakil Presiden untuk masa periode jabatan 2019-2024.

Cahyono dan Trijono (2004) menyatakan bahwa pemilu menjadi cara standar dalam upaya merangkum suara masyarakat dengan tepat, terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat terlaksananya sebuah perubahan sistem ke arah yang lebih baik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam suatu negara demokrasi, karena hal tersebut sebagai tolak ukur sebuah keberhasilan dalam sistem politiknya. Sistem politik negara dikatakan berhasil jika semakin banyak warga negara yang ikut berpartisipasi, namun akan dikatakan sistem politiknya kurang baik jika partisipasi politik yang dimiliki warga negaranya rendah (Mashuri, 2014). Partisipasi politik sendiri merupakan keterlibatan warga negara dalam segala tahapan kebijakan dimulai sejak pembuatan keputusan, penilaian keputusan hingga bisa juga sampai ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Wahyudi, Fernando, Ahmad, Khairani, Fatimah, Agung, & Milla, 2013).

Herbert mendefinisikan (dalam Budiarto, 1998) konsep partisipasi politik ialah adanya kegiatan sukarela masyarakat dengan mengambil bagian dalam sebuah proses pemilihan penguasa yang secara langsung maupun tidak langsung ikut andil dalam proses pembuatan

sebuah kebijakan umum. Namun pada pemilu kali ini tidak semua masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik, salah satunya perilaku golput (golongan putih) yakni seseorang yang secara sengaja tidak hadir untuk tidak terlibat secara langsung pada saat pemilu dan ada pula yang hadir namun melakukan pemilihan lebih dari satu kandidat khususnya pada pileg sehingga suara tidak sah besar.

Walaupun partisipasi masyarakat pada pemilu secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun hasil tersebut tidak merepresentasikan keseluruhan hasil pemilu di berbagai lembaga yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kali ini. Dilansir dalam detikNews peneliti LSI Denny memaparkan hasil golput yang terjadi pada pilpres mencapai angka 19.27% dan pileg 30.05%. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung berfokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden sedangkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif sendiri tidak berpengaruh secara signifikan. Terlihat dari pemilihan legislatif pada tiap periodenya yang tidak pernah melampaui angka 75% dan dengan berlangsungnya pemilu serentak di tahun ini membuat semakin rendahnya angka partisipasi tersebut.

Legislatif sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu lembaga legislatif yang mewakili partai (seperti DPR, DPRD) dan juga lembaga legislatif independen yang merupakan perwakilan daerah (DPD). Terlebih dalam kasus DPD dikutip dari laman berita DetikNews (2019) menurut Komisioner KPU RI yang membawahi Pulau Jawa mengemukakan bahwa, dari tiga provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat banyak pemilih membiarkan surat suara untuk lembaga legislatif khususnya DPD tidak dicoblos atau utuh dan juga ada yang menyoblos lebih dari satu calon yang membuat suara tidak sah besar. Diantara lembaga legislatif lainnya, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) mengalami angka partisipasi yang sangat rendah di berbagai wilayah.

Adapun penelitian awal yang telah dilakukan kepada 25 responden mendapatkan hasil bahwa 72% responden memilih ikut berpartisipasi dalam pemilu khususnya pada pemilihan anggota legislatif dengan alasan supaya hak suaranya tidak disalahgunakan. Pada saat pemilihan umum 2019 untuk pemilihan legislatif banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan benar dan tepat yaitu 48% diantaranya memilih lebih dari satu calon dengan alasan bingung karena terlalu banyak pilihan dan 12% lainnya memilih tidak mencoblos surat suara. Dalam memilih anggota legislatif sebesar 75% masyarakat melihat dari partai politik dan untuk anggota DPD 90% patokan dalam memilih ialah foto kandidat yang terdapat di kertas pemilihan, ada juga yang mengikuti saran dari keluarga maupun kerabat.

Adapun penelitian lanjutan kepada 25 responden yang dilakukan setelah pemilu selesai mendapatkan hasil, sebanyak 33% responden mempercayai bahwa anggota legislatif yang telah terpilih akan memenuhi janjinya untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah mereka sedangkan 29% lainnya meragukan dan 38% responden mengaku tidak yakin akan kinerja anggota legislatif yang telah terpilih akan mampu mensejahterakan serta bertindak untuk kepentingan bersama. 56% responden meyakini bahwa masih ada harapan besar terhadap anggota legislatif yang telah terpilih saat ini untuk senantiasa memberikan sumbangsih dalam pembangunan khususnya yang mewakili wilayah responden sedangkan 44% responden lainnya menyatakan ragu akan anggota legislatif yang sudah terpilih dapat mewakili wilayahnya untuk lebih baik lagi. Namun 72% responden mengaku tidak mengetahui siapa saja anggota legislatif yang terpilih khususnya yang mewakili tempat responden berada dan 28% lainnya sudah mengetahui.

Penelitian diatas menggambarkan bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan serta keyakinannya terhadap anggota legislatif dengan turut berpartisipasi pada pemilu kali ini. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan pada mahasiswa dengan melihat partisipasi politik dari aktivitas mereka di media sosial dalam menyoroti pilkada kota

Semarang tahun 2014 yang mendapatkan hasil bahwa efikasi politik dan kepercayaan politik memiliki hubungan dengan partisipasi politik daring mahasiswa pengguna media sosial di Kota Semarang (Nurfitri, 2018). Di sisi lain Paige (dalam Akhrani, 2018) mengatakan yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik serta kepercayaan terhadap pemerintah atau sistem politik. Adapun hasil studi yang telah dilakukan Anderson (2010) menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik diantaranya efikasi politik internal, kepercayaan personal dan *sense of community* dimana efikasi politik internal dan kepercayaan personal yang berperan secara langsung terhadap partisipasi politik. Dengan demikian kepercayaan politik serta efikasi politik merupakan variabel yang memiliki hubungan dengan partisipasi politik.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan KPU menyatakan bahwa secara keseluruhan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 mencapai 81% (Purbolaksono, 2019). Namun hasil partisipasi masyarakat terhadap lembaga legislatif berbanding terbalik dengan hasil keseluruhan tersebut dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Data yang telah dirilis KPU serta LSI menyatakan, tingkat partisipasi politik dalam pemilihan legislatif di Indonesia di tahun 2019 sebesar 69.95% (Detiknews, 2019) dimana angka tersebut menurun dibandingkan dengan pemilihan legislatif pada periode sebelumnya yang mampu capai angka 75.2% (Detiknews, 2014). Rully peneliti LSI menjelaskan bahwa perbedaan yang cukup signifikan tersebut terjadi karena masyarakat lebih fokus pada pemilihan presiden dibanding pemilihan legislatif. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Marien (2011) mendapatkan hasil bahwa pada 23 negara menyatakan, terdapat kepercayaan politik yang tinggi ketika hasil dari pemilihan politik tersebut haruslah sesuai atau berimbang dengan keadaan, yang biasa dikatakan dengan proporsional, namun jika negara tersebut tidak proporsional dalam pemilihan politik maka kepercayaan politik masyarakat semakin rendah. Dari pemaparan di atas, hal tersebut sesuai dengan keadaan yang

sedang dialami Indonesia pada pemilu serentak 2019, dimana tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu kali ini termasuk ke dalam kategori tidak proporsional.

Banyak faktor yang menyebabkan ini terjadi, Limilia dan Evie (2018) mengatakan bahwa faktor yang berperan penting dalam partisipasi politik ialah pengetahuan serta persepsi pada politik. Kurangnya pengetahuan menjadi salah satu penyebab dari hasil pemilihan yang rendah serta sistem atau media sosialisasi yang terbatas membuat masyarakat kebingungan dalam memilih anggota legislatif. Meningkatnya jumlah koruptor dari tiap periodenya juga menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam memilih, Roosyana (2019) menjelaskan bahwa *Indonesia Corruption Watch (ICW)* dan *Indonesia Budget Center (IBC)* telah merilis penilaian kinerja para wakil rakyat di lembaga legislatif yang hasilnya sebagian besar kinerjanya buruk dan perilakunya koruptif. Hal ini memperkuat hasil yang didapatkan lembaga legislatif pada pemilihan kali ini.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa mulai lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Penelitian yang dilakukan Matulesy dan Samsul (2013) menyatakan salah satu faktor yang mendorong individu berpartisipasi dalam bidang politik ialah rasa percaya (*trust*) terhadap sistem politik. Seseorang yang percaya pada politik akan lebih aktif berpartisipasi pada kegiatan politik di Indonesia. Begitupun penggunaan media sosial memiliki peranan terhadap partisipasi politik melalui variabel kepercayaan (*trust*) sebagai variabel mediator dimana hasilnya menyatakan bahwa variabel kepercayaan memiliki peranan langsung terhadap partisipasi politik (Kuncoro, 2018). Sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan pada politik dapat secara langsung membuat individu melakukan partisipasi politik.

Menurut Loeber (2011) kepercayaan politik merupakan sikap, harapan dan keyakinan yang dimiliki individu terhadap lembaga-lembaga politik, sistem demokrasi dan politisi. Jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan individu maka akan mengakibatkan adanya

pesimistis terhadap keyakinan individu pada politik. Harapan masyarakat (*public expectation*) terhadap seorang pemimpin yang dapat merespon aspirasi, mengagresikan serta mengartikulasikan tuntutan dari masyarakat merupakan sebuah kepercayaan politik (Matulesy & Samsul, 2013). Selain itu menurut Gamson (dalam Kim & Kim, 2008) di dalam kepercayaan politik, terdapat ekspektasi bahwa pemerintahan dapat bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Adapun dimensi dari kepercayaan politik menurut Grimmelikhuijsen dan Knies (2015) terdiri dari *Perceived Competence* (mempersepsikan pemerintah mampu, efektif, cakap dan profesional dalam bekerja), *Perceived Benevolence* (mempersepsikan pemerintah peduli akan kesejahteraan publik dan termotivasi untuk bertindak atas kepentingan umum), *Perceived Integrity* (mempersepsikan pemerintah tulus, jujur, dan dapat memenuhi janjinya). Selain *political trust* (kepercayaan politik) Orum (Matulesy, 2008; Matulesy & Samsul, 2013) menjelaskan bahwa variabel *political efficacy* juga berpengaruh terhadap munculnya partisipasi dalam gerakan sosial masyarakat. Individu yang meyakini hak suaranya itu penting menganggap bahwa hak suara mereka tersebut dapat memengaruhi kebijakan pemerintahan yang akan menjabat nanti. Keyakinan kepada pemerintah tersebut disebut sebagai *political efficacy* (Craig & Maggioto, dalam Zimmerman, 1989; Fitriah, 2014).

Campbell, Gurin dan Miller (1954); Schulz (2005) mengartikan bahwa efikasi politik adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial memungkinkan untuk berubah dan setiap warga negara dapat berperan dalam membawa perubahan tersebut. Rosenbaum, 1975; Setiawan, 2009; Matulesy & Samsul, (2013) mendefinisikan *political efficacy* sebagai perasaan bahwa tindakan politik individu memiliki atau dapat menghadirkan pengaruh atas proses politik. Keyakinan pada diri seseorang atas kemampuannya dalam memahami politik serta keinginan untuk dapat didengar oleh pemerintah juga meyakini bahwa dirinya dapat membuat perubahan pada politik merupakan *political efficacy* (Catt, 2005). Namun seseorang

yang tidak merasa menjadi bagian atau merasa kurang berperan pada pengambilan keputusan suatu kebijakan publik (*political efficacy* yang rendah), maka akan mengarahkan pada munculnya ketidakpercayaan pada sistem politik (Matulessy, 2018).

Adapun dimensi dari efikasi politik ialah efikasi politik eksternal serta efikasi politik internal (Schulz, 2005; Morrell, 2005; Kahne & Westheimer, 2006; Curran, 2008; Sylvester, 2010; Louisa, et al., 2012; Ognyanova, 2012). Sylvester, 2010 dalam (Nurchaya & Olievia, 2017) menyatakan efikasi politik eksternal ialah keyakinan seseorang bahwa sistem politik dapat tanggap terhadap tuntutan politik sedangkan efikasi politik internal ialah keyakinan di dalam diri individu bahwa dirinya cukup kompeten untuk membuat perubahan dalam keputusan politiknya.

Fitriah (2014) pada penelitiannya menyatakan bahwa efikasi politik memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik dimana jika terjadi peningkatan pada nilai internal efikasi politiknya maka akan menimbulkan adanya peningkatan pada partisipasi politik di masyarakat. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Zaenulmillah (2017) menyatakan bahwa efikasi politik memiliki korelasi positif dengan partisipasi politik pada pemilih pemula di kecamatan Blimbing kota Malang. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa, terdapat hubungan antara kepribadian seseorang terhadap partisipasi politik yang dilakukannya dengan efikasi politik sebagai variabel mediasi (Vecchione & Caprara, 2009).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih luas di kalangan masyarakat yang masih memiliki andil lebih besar terhadap pemilihan umum terkait kepercayaan politik juga efikasi politik mereka terhadap partisipasi politik pada pemilu serentak yang baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara efikasi politik dan kepercayaan politik terhadap partisipasi politik.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan politik masyarakat terhadap pemilu serentak 2019?
2. Bagaimana tingkat efikasi politik pada masyarakat terhadap pemilu serentak 2019?
3. Bagaimana tingkat partisipasi politik pada masyarakat terhadap pemilu serentak 2019?
4. Apakah terdapat pengaruh kepercayaan politik dan efikasi politik terhadap partisipasi politik?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepercayaan politik pada masyarakat terhadap pemilu serentak 2019
2. Mengetahui tingkat efikasi politik pada masyarakat terhadap pemilu serentak 2019
3. Mengetahui tingkat partisipasi politik pada masyarakat terhadap pemilu serentak 2019
4. Membuktikan pengaruh kepercayaan politik dan efikasi politik terhadap partisipasi politik.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Secara teoretis. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam dan dapat menjadi landasan dalam mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Politik. Selain itu, juga dapat menjelaskan fenomena sosial politik yang ada dalam Psikologi.

Secara praktis. penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada elit politik agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik serta menumbuhkan kepercayaan juga keyakinan dari masyarakat agar berpartisipasi dalam khazanah politik. Hal tersebut dapat mendukung keberhasilan dalam sistem politik di Indonesia dan memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti fenomena-fenomena psikologi politik khususnya efikasi politik, kepercayaan politik dan partisipasi politik.